

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
(Studi Kasus di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada
Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh :

GANANG NGESTU W

C 100 120 055

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
(Studi Kasus di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada
Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

GANANG NGESTU W

C 100 120 055

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
(Studi Kasus di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada Perkara Nomor
0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd)

Yang ditulis oleh :

GANANG NGESTU WIJAYANTO

C.100.120.055

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatun Ni'ami, SH,M.Hum

Sekretaris : Kuswardani SH,.SU

Anggota : Darsono SH,.M.Hum

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan



GANANG NGESTU W

C 100 120 055

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
(Studi Kasus di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada
Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd)**

ABSTRAK

Pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi dan merupakan hal yang menjadi salah satu pokok masalah reproduksi yang dihadapi masa kini. Hal ini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, diri sendiri, dan orang tua. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan dispensasi kawin di bawah umur terkait putusan nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd dan hukum perkawinan mensikapi banyaknya fenomena pernikahan dini di Indonesia menggunakan metode normatif deskriptif, dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dan studi lapangan di dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim ditolaknya dispensasi kawin karena usia calon mempelai perempuan masih berusia dini yang akan berakibat buruk apabila pernikahan itu tetap dilaksanakan. Departemen Agama dalam mensikapi persoalan pernikahan usia dini dengan selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman secara terus menerus dengan melibatkan tokoh masyarakat di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Pengetahuan, Penyebab, Dampak, Pernikahan Dini, Remaja.

ABSTRACT

Early marriage in Indonesia is still very high and it became one of the staples of reproductive problems faced today. This is often caused by economic factors, education, yourself, and parents. This research was conducted in the Karangrayung District Regency of Grobogan. The purpose of this research is to know the judge's consideration of the denied petite marriage disqualification application related to the decision number 0377 / Pdt.P / 2015 / PA.Pwd and marriage law to address the number of early marriage phenomenon in Indonesia using descriptive normative method, with primary and secondary data. Data collection techniques used literature studies, and field studies were analyzed qualitatively. The results showed that judge consideration denied marriage dispensation because the age of the prospective bride is still aged that will be bad if the marriage is still implemented. Ministry of Religious Affairs in addressing the issue of early marriage by always providing socialization and understanding continuously by involving community leaders in the region.

Key word : Knowledge, Causes, Impact, Early Marriage, Teenage.

1. PENDAHULUAN

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah "*perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita*". Undang-undang negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

Saat ini pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Grobogan cukup tinggi. Faktor utama pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan dan pergaulan anak yang semakin tidak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten maupun Kemenag Kabupaten Grobogan untuk mencegah dan mengurangi angka pernikahan usia dini.

Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.

Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu: 1) untuk mengetahui pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan dispesasi kawin di bawah umur terkait putusan nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd, dan 2) untuk mengetahui hukum perkawinan mensikapi banyaknya fenomena pernikahan dini di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: data sekunder yang berupa bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Atas Ditolaknya Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Terkait Putusan Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd

Dalam memberikan keputusan diterima atau ditolaknya dispensasi nikah oleh pemohon, maka sesungguhnya majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut dijelaskan dua hal pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi atau menolak dispensasi nikah yang diajukan pemohon.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus perkara dispensasi Nikah Majelis melihat calon istri dari pemohon yang akan menjadi calon istrinya dari segi umur masih terlalu muda yaitu berusia 14 tahun 1 bulan. Apabila calon istritelah memenuhi usia yang ditetapkan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi Nikah bagi pemohon. Apabila ada larangan nikah yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi nikah bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut jika calon istri tersebut belum cukup umur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Adapun pertimbangan hakim pengadilan agama purwodadi dalam memutus perkara dispensasi nikah menimbang, bahwa terhadap maksud pemohon tersebut majelis hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya sehingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 15 ayat 2 kompilasi hukum

Islam, namun tidak berhasil menimbang, bahwa pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di Nikahkan dan pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas.

Pada dasarnya bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan para saksi, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan pasal 7 Ayat 2 UU Nomor Tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama menolak keinginan anak pemohon tersebut (bukti P.5 surat penolakan pernikahan) sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan apabila tetap akan meNikah, maka harus ada dispensasi Nikah dari Pengadilan agamasesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 15 Ayat (2) KHI.

Dalam bukti P.4 (KTP Calon istri) dan bukti P.6 (Surat Kehendak Nikah), majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan nikah agar supaya dapat diwujudkan tujuan nikah secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya nikah antara calon suami atau isteri di bawah umur.

Para hakim menimbang, bahwa batas umur nikah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon isteri yang di bawah umur, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur Nikah harus di taati oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya hakim sebagai penegak hukum, bahwa kekhawatiran pemohon apabila Nikah anak perempuannya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana petunjuk ayat 6 Surat At-Tahrim dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga dapat mengurangi

hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan nikah dalam usia yang masih sangat muda, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon yang masih di bawah sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya-upaya yang dapat mengarahkan anak pemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai dengan usia nikah yang diperbolehkan oleh hukum nikah Indonesia.

Oleh karena itu majelis hakim berpendirian bahwa nikah yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada dibawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan nikah akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi jalan pintas bagi orang lain melakukan hal yang serupa sehingga prinsip calon suami atau calon isteri harus telah matang jiwa raganya yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah akan sia-sia dan tidak ada gunanya.

Bahwasanya umur anak pemohon belum mencukupi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lagi pula secara fisik tidak meyakinkan mampu membina rumah tangga serta kekhawatiran pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat, oleh karena itu pemohon telah tidak mampu membuktikan akan perlunya segera meNikahkan anaknya yang di bawah umur Nikah, maka berdasarkan Pasal 5 AYAT (2) dan Pasal 10 AYAT (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juncto Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat permohonan pemohon harus ditolak.

Pasal 184 HIR, pasal 195 Rbg, pasal 23 UU. No 14 Tahun 1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidaktertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan yang di ucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban menurut pasal 184 HR (pasal 195 Rbg) cukup dimuat secara singkat, ringkas, namun di dalam prakteknya tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam

putusan. Dalam putusan hakim menimbang dengan benar sehingga bisa mengeluarkan putusan yang sebagai mana mestinya.

Sesuai undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 tentang pernikahan, dispensasi Nikah ialah permohonan bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 tahun untuk pria dan kurang dari 16 tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat dispensasi Nikah dari pengadilan agama bertempat dan syarat-syarat untuk bisa memiliki surat dispensasi nikah.

3.2 Hukum Perkawinan di Indonesia Mensikapi Banyaknya Fenomena Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi dan hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Untuk membentuk suatu keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan moral dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani rohani dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.

Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Alasan perceraian bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa

kematangan diri dari segala aspek. Fenomena menikah di usia muda berbuntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, risiko penyakit menular seks (PMS), serta perilaku asosial lainnya. Usia kehamilan yang terjadi dibawah usia 20 tahun dalam keadaan belummatangnya mental seseorang remaja akanmempengaruhi penerimaan kehamilannya, dimanaalat reproduksi remaja yang belum siap menerimakehamilan, merasa tersisih dari pergaulan karenadianggap belum mampu membawa diri terkadangperasaan tertekan karena mendapat cercaan darikeluarga, teman atau lingkungan masyarakat.

Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berkepentingan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya bagi masyarakat terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai kepada bangsa secara keseluruhan.Kategori pendidikan memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi terjadi dengan suami berpendidikan rendah dibandingkan dengan istri yang mempunyai suami berpendidikan tinggi.

Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di suatu negara menyumbangkan pada rendahnya indeks pembangunan manusia di suatu negara yang disebabkan antara lain oleh kasus-kasus pernikahan usia muda. Berdasarkan dari badan pusat statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan bahwa perkawinan usia dini masih menjadi persoalan serius. Perkawinan anak-anak usia 10-15 tahun mencapai 13,40%, sedangkan perkawinan anak usia 16-18 tahun mencapai 33,41%, dan perkawinan di usia 19-24 tahun mencapai 41,33%.

Akibatnya, mereka tidak dapat bernegosiasi soal hubungan seks yang aman (safe sex). Anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia muda mudah mengidap penyakit HIV atau AIDS karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-sel yang melindunginya masih belum kuat sehingga mudah terluka. Penelitian Barua menunjukan bahaya ketularan HIV atau AIDS pada pengantin anak-anak sangat mengkhawatirkan.Selain itu karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi, ditemukan perempuan-perempuan yang mendapatkan HIV/AIDS karena pasangannya (suamiatau pacar) yang berganti-ganti pasangan.

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human Papiloma Virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Umumnya sel-sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas.

Depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan.

Dalam pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Oleh karena itu, apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil).

Pada kasus anak-anak pekerja dibawah umur ini, terjadi eksploitasi anak dimana anak dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang berhubungan dengan proses produksi. Secara tidak langsung orang tua yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi, dikarenakan mereka yang menyuruh anak-anak mereka bekerja sebagai buruh.

Kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) merupakan akibat atas berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga. Ketika pasangan suami istri tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan keluarga dengan baik, disertai dengan munculnya emosi, maka akan memicu tindakan KDRT. Perkawinan usia muda dituding sebagai pemicu munculnya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Menurut survey yang dikeluarkan lembaga Plan Indonesia, sebanyak 49% pelaku perkawinan usia muda mengalami KDRT.

Setiap periode kehidupan manusia punya masalahnya sendiri-sendiri termasuk periode remaja. Remaja seringkali sulit mengatasi masalah mereka karena ketika masih anak-anak semua masalah mereka selalu diatasi oleh kedua

orangtua mereka atau orang-orang dewasa. Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.

Perkawinan usia muda dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mempengaruhi hubungan antar mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Masa depan pernikahan di usia muda kurang terjamin. Hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) di Itali, menyatakan, perkawinan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung risiko yang tak terhitung besarnya. Pernikahan di usia muda baik karena keterpaksaan ataupun bukan biasanya menimbulkan tanggapan yang kurang baik dari sebagian masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pernikahan terjadi karena pergaulan yang tidak baik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang tersebut di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Hakim dalam menerima atau menolak dispensasi dengan memperhatikan asas-asas kemaslahatan setelah dilangsungkannya pernikahan, sehingga membutuhkan kejelian dan ketelitian hakim dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut apakah diterima atau ditolak. Dalam memberikan keputusan diterima atau ditolaknya dispensasi nikah oleh pemohon, maka sesungguhnya majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu bahwa calon mempelai perempuan masih berumur 14 tahun 1 bulan dan ini sangat rentan terhadap kasus-kasus setelah menikah seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kasus lain akibat pernikahan usia dini.

Kedua, Dalam mensikapi perkawinan usia dini di Indonesia, maka lembaga negara terutama Departemen Agama telah memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat akan bahayanya menikah usia dini. Salah satu upaya yang diambil adalah dengan tidak memberikan izin menikah apabila usia calon pengantin masih berada di bawah umur seperti pada contoh kasus di atas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Departemen Agama untuk mengurangi jumlah pernikahan usia dini dengan selalu memberikan sosialisasi-sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat. Sosialisasi terus menerus dilakukan untuk merubah paradigma berfikir orang tua saat ini bahwa dengan anak menikah, maka tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang tua telah selesai.

4.2 Saran

Pertama, dalam memberikan kompensasi pernikahan sebaiknya dipertimbangkan dengan melihat faktor kesiapan calon suami istri dan diselaraskan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, orang tua sebaiknya lebih mementingkan pendidikan anaknya, minimal tingkat SMA khususnya kepada anak perempuan, agar wawasannya lebih luas dan tidak terjadi pernikahan di usia muda. Dengan wawasan dan pendidikan yang layak, maka diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan kontrol emosinya. *Ketiga*, bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. Karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda yang disebabkan kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik, 2015, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta, Indonesia.

Damayanti, Eka Putri, Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Tahun 2008-2010, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 2, No. 2, Mei 2013

Deputi, 2008, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Djamilah, Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1, Mei 2014
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009, *Jurnal Sari Pediatri* 2009;11(2):136-41).
- Hesti Agustian, Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya, Spektrum PLS Vol. I, No.1, April 2013
- Intan, Iwan, 2012, *Kesehatan reproduksi*, Jakarta: Salemba Medika.
- Landung, 2009, Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja, Jurnal MKMI, Vol 5 No.4. Oktober 2009, hal 89-94.
- Mahfudin dan Waqiah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (*online*); 33-49
- Mubasyaroh, 2016, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Nurhasanah dan Susetyo, Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1: 34-41
- Pustikasari, Atikah, 2013, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri, Jurnal Ilmiah kesehatan, 5(3); September 2013
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika
- Wa Ana Sari, Yanti, Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.4 April 2016

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan di www.depag.go.id
UU No. 1 tahun 1974